

**RENCANA AKSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	TARGET				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat Pemerintah daerah	Nilai Kinerja Sekretariat Daerah				62,76							62,76		Sekretaris Daerah
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD				2,78					2,78				Sekretaris Daerah
1							Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Dukungan Manajemen Internal	76				76	Rp. 103.898.444,761	Asisten Adm. Umum
1.1							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	85				85	Rp 518,432,991	Kabag. Perencanaan Keuangan
								2. Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	80				80		
1.1.1							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	2	2	2		Rp 251,371,578	Perencana Ahli Muda
1.1.2							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2	1	1	1	Rp 85,362,703	Penelaah Teknis Kebijakan
1.1.3							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan	2	1	1	1	Rp 133,486,268	Penelaah Teknis Kebijakan
1.1.4							Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan urusan selain renja dan renstra Perangkat Daerah	5 Dok	3	3	3	3	Rp 48,212,442	Perencana Ahli Muda
1.2							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase temuan ditindaklanjuti	85				85	Rp 42,645,873,176	Kabag. Perencanaan Keuangan
								2. Persentase LHP nihil	20				20		
1.2.1							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4242 Orang/bulan	1288	966	1288	966	Rp 42,026,392,873	Penelaah Teknis Kebijakan
1.2.2							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	725 Dokumen	100	200	425		Rp 536,304,792	Administrasi Perkantoran
1.2.3							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan		1	1		Rp 15,596,226	Penelaah Teknis Kebijakan
1.2.4							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	Rp 67,579,285	Penelaah Teknis Kebijakan
1.3							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	100	25	25	25	25	Rp 746,518,220	Kabag Umum
1.3.1							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3	3	3	3	Rp 456,547,500	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
1.3.2							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang			90	90	Rp 289,970,720	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
1.3.3							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	85	20	20	20	25	Rp 16,206,358,049	Kabag Umum

1.3.4						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	16 Paket	4	4	4	4	Rp	189,226,500	Analisis Kebijakan ahli muda
1.3.5						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	17 Paket	3	10	4		Rp	4,649,024,339	Analisis Kebijakan ahli muda
1.3.6						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	25 Paket	7	6	6	6	Rp	1,850,000,000	Analisis Kebijakan ahli muda
1.3.7						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	30 Paket	7	8	8	7	Rp	166,951,210	Analisis Kebijakan ahli muda
1.3.8						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Paket	2	3	2	2	Rp	83,310,000	Analisis Kebijakan ahli muda
1.3.9						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang telah Terfasilitasi	150 Laporan	40	40	35	35	Rp	6,000,000,000	Analisis Kebijakan ahli muda
1.3.10						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	Rp	3,159,846,000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
1.3.11						Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	1	3	3	3	Rp	108,000,000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
1.4						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	85	20	20	20	25	Rp	29,891,858,952	Kabag Umum
1.4.1						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan layanan	12 Laporan	4	4	4	4	Rp	6,416,744,541	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
1.4.2						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	5 Laporan	1	1	1	2	Rp	13,786,220,655	Analisis Kebijakan ahli muda
1.4.3						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	3	3	3	3	Rp	9,688,893,756	Analisis Kebijakan ahli muda
1.5						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	75	15	20	20	20	Rp	6,360,360,740	Kabag Umum
1.5.1						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1	1	1		Rp	599,390,600	Analisis Kebijakan ahli muda
1.5.2						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	5	5	5	5	Rp	877,715,400	Analisis Kebijakan ahli muda
1.5.3						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1	1	1	Rp	4,883,254,740	Analisis Kebijakan ahli muda
1.6						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	90	25	25	20	20	Rp	1,288,136,000	Kabag Umum
1.7						Penyedia gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 orang/Bulan	8	6	8	6	Rp	300,000,000	Penelaah Teknis Kebijakan
1.7.1						Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	2	3	3	2	Rp	988,136,000	Analisis Kebijakan ahli muda
1.7.2						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	2	2	2	2	Rp	300,000,000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
1.7.3						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/bulan	6	6	6	6	Rp	600,000,000	Administrasi Perkantoran
1.7						Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	85	20	20	20	25	Rp	4,589,852,827	Kabag Umum
1.7.1						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket Rumah Tangga yang disediakan di Rumah Tangga Kepala Daerah	12 paket	3	3	3	3	Rp	2,200,000,000	Analisis Kebijakan ahli muda

1.7.2						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Rumah Tangga yang disediakan di Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 paket	3	3	3	3	Rp 1,902,771,676	Analisis Kebijakan ahli muda
1.7.3						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket Rumah Tangga yang disediakan di Rumah Tangga Sekretaris Daerah	12 paket	3	3	3	3	Rp 487,081,151	Analisis Kebijakan ahli muda
1.9						Penataan Organisasi	Persentase efektivitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100	25	25	25	25	Rp 346,871,752	Kabag Organisasi
1.9.1						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dok	2	3	4	3	Rp 119,481,752	Analisis Kebijakan ahli muda
1.9.2						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8 Lap	1	2	2	3	Rp 94,610,000	Analisis Kebijakan ahli muda
1.9.3						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dok	1	1	2	2	Rp 56,680,000	Analisis Kebijakan ahli muda
1.9.4						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dok	1	1	1	1	Rp 20,006,000	Analisis Kebijakan ahli muda
1.9.5						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Dok	4	1	1	2	Rp 56,094,000	Analisis Kebijakan ahli muda
1.10						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana	85	20	20	20	25	Rp 3,994,394,698	kabag Prokopim
1.10.1						Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	3	3	3	3	Rp 1,588,014,860	Kasubag Protokol
1.10.2						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	3	3	3	3	Rp 1,243,271,604	Perata Hubunngan Masyarakat Ahli Muda
1.10.3						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	3	3	3	3	Rp 1,163,108,234	Perata Hubunngan Masyarakat Ahli Muda
2						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	50,89				50,89	Rp. 35.365.436.783	Asisten Pmerintahan dan Kesra
2.1						Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	100	25	25	25	25	Rp 2,394,244,229	Kabag Tapam
2.1.1						Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan adminitrasi pemerintahan	8 Dok	1	3	2	2	Rp 875,407,837	Analisis Kebijakan ahli muda
2.1.2						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	6 Dok	1	1	2	2	Rp 459,966,100	Analisis Kebijakan ahli muda
2.1.3						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	3 Dok	3	-	-	-	Rp 1,058,870,292	Analisis Kebijakan ahli muda
2.2						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	100	25	25	25	25	Rp 29,716,572,412	Kabag Kesra
2.2.1						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	357 Dok	137	120	50	50	Rp 25,003,192,120	Analisis Kebijakan ahli muda
2.2.2						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Kesejahteraan Sosial	100 Dok	20	20	30	30	Rp 4,554,228,292	Analisis Kebijakan ahli muda
2.2.3						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat	15 Dok	3	4	4	4	Rp 159,152,000	Analisis Kebijakan ahli muda
2.3						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	85	20	20	20	25	Rp 1,400,579,178	kabag Hukum
2.3.1						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang telah diproses	9 dokumen			9		Rp 388,262,892	
							Dokumen Rancangan Peraturan Bupati yang telah diproses	14 dokumen	4	6	2	2		

							Dokumen Rancangan Surat Keputusan Bupati dan Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah yang diproses	871 dokumen	100	200	400	171		
							Dokumen Rancangan Instruksi Bupati yang diproses	6 dokumen		4	2			
2.3.2							meregister dalam surat masuk permohonan bantuan hukum mempelajari subtansi perkara/ permasalahan di sesuaikan dengan peraturan perundang undangan pencermatan gugatan perdata maupun tata usaha negara koordinasi dan pengumpulan data dan bukti penyusunan telaahan staf, memeriksa telaahan staf lalu diserahkan keatasan langsung rapat koordinasi dengan pihak yang digugat membuat surat kuasa yang di tanda tangani pemohon dan menerima surat tugas dari pimpinan menghadiri sidang persiapan, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, relik, duplik, pembuktian, saksi saksi, kesimpulan pembacaan putusan oleh Hakim	4 Kasus	1	1	1	1	Rp 901,921,143	
2.3.3							Melaksanakan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah Meningkatkan Pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan	882 Dok	220	220	220	222	Rp 110,395,143	
2.4							Fasilitasi Kerjasama Daerah	50	15	15	10	10	Rp 206,792,929	Kabag Kerjasama
2.4.1							Invenrasasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan melalui pemetaan kerjasama daerah tahun 2025 Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi ke perangkat daerah dengan tema pemetaan kerjasama dan tata kerjasamaA dengan mengundang nara sumber dari kementerian dalam negeri Melaksanakan penyusunan Paraturan Bupati tentang tata cara kerjasama daerah Melaksanakan koordinasi dan pmdampingan dengan propinsi, kementerian, daerah lain dan pihak ketiga yang akan kerjasama Rapat koordinasi dengan daerah lain, SKPD dan pihak ketiga yang akan bekerja sama Membuat telaahan staf ke Bupati tentang rencana kerjasama baik dengan daerah lain, instansi vertikal dan pihak ketiga, baik yang berasal dari usulan pemerintah, pihak ketiga maupun daerah lain baik kerjasama wajib maupun sukarela Menyusun Draft rencana kerja bersana dengan instasni teknis yang terlibat dalam rencana kerjasama yang akan dilaksanakan Menfailitasi secara administrasi bagi phak yang ingin melaksanakan penandatanganan kerjasama secara ceromonial Melaksanakan tandatangan kesepakatan bersama (MoU) dengan daerah lain, instansi vertikal dan pihak ketiga	25 Dok	6	6	7	6	Rp 91,489,500	Analisis Kebijakan ahli muda

								Melaksanakan perijinan bagi pejabat daerah, amggota DPRD dan ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (sejak agustus 2024 Kemendagri memberikan akun ke setiap bagian kerjasama Kabupaten /Kota untuk membatasi kegiatan ini)								
2.4.2							Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Melaksanakan fasilitasi evaluasi pemetaan kerjasama Melakuaknkoordinasi evaluasi kerjamasa dengan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Paser Melaksanakan inventarisir dab revitalisasi kerjasama di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser Menyiapkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	12 Laporan	3	3	3	3	Rp	115,303,429	Analis Kebijakan ahli muda
3							Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan	20				20	Rp. 5.826.151.386	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.1							Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.	85	20	20	20	25	Rp	184,218,222	Kaabg Perekonomian
3.1.1							Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1. Membuat Rencana Kerja Anggaran Kas, Membuat Jadwal Kegiatan 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan perangkat Daerah,Dewan Pengawas BUMD dan BLUD 3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4. Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD dalam Provinsi 5. Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD ke Luar Provinsi	12 Dokumen	3	3	3	3	Rp	61,406,222	Analis Kebijakan ahli muda
3.1.2							Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1. Membuat Rencana Kerja, menyusun Anggaran Kas, membuat jadwal kegiatan. 2. Mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait permasalahan. 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi permasalahan dengan pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan. 4. Melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi pengambilan kebijakan penyelesaian permasalahan. 5. Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan. 6. Melaksanakan analisa dan penyusunan laporan.	12 Laporan	3	3	3	3	Rp	61,406,000	Analis Kebijakan ahli muda
3.1.3							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1. Membuat Rencana Kerja, menyusun anggaran kas, membuat jadwal kegiatan 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan perangkat daerah, dan instansi terkait 3. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 3. Konsultasi dan koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan Perangkat Daerah, dan instansi terkait di dalam maupun di luar daerah 4. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	12 Laporan	3	3	3	3	Rp	61,406,000	Analis Kebijakan ahli muda
3.2							Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100	25	25	25	25	Rp	180,586,613	Kabag Adm. Pembangunan
3.2.1							Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen		1	1		Rp	48,118,357	Analis Kebijakan ahli muda

3.2.2						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	4	4	4	4	Rp	58,450,318	Analisis Kebijakan ahli muda
3.2.3						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	4	4	4	4	Rp	74,017,938	Analisis Kebijakan ahli muda
3.3						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	70				70	Rp	414,125,470	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
							Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	5,5				5,5			
							Tingkat Kematangan UKPBJ	50				50			
3.3.1						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dok	3	3	3	3	Rp	81,581,470	Kasubbag Pengelolaan Barang dan Jasa
3.3.2						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dok	3	3	3	3	Rp	190,228,000	Pengadaan Barang dan Jasa
3.3.3						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 orang	0	0	10	10	Rp	142,316,000	Pengadaan Barang dan Jasa
3.4						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun	3				3	Rp	405,329,310	Kabag Sumber Daya Alam
3.4.1						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	16 Dokumen	4	5	5	2	Rp	68,284,240	Analisis Kebijakan ahli muda
3.4.2						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12 Dokumen	3	3	3	3	Rp	56,049,870	Analisis Kebijakan ahli muda
3.4.3						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	12 Dokumen	3	3	3	3	Rp	56,199,040	Analisis Kebijakan ahli muda


TANA PASER, 18 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 196612111986091002

